

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korea Selatan merupakan sebuah negara di kawasan Asia Timur yang sedang terus berkembang baik segi ekonomi maupun politiknya sejak kemerdekaannya atas Jepang di tahun 1945. Negara ini merupakan hasil pecahan dari Korea yang semula utuh sebagai satu kesatuan namun kemudian terbagi dua menjadi Korea Selatan dan Korea Utara pasca perang korea tahun 1950-1953. Korea Selatan terletak di Asia Timur dimana kawasan ini merupakan suatu wilayah regional di Asia yang bisa dikatakan cukup konflikual. Hal ini dikarenakan masing-masing negara yang berada di kawasan ini memiliki permasalahan dengan negara tetangganya satu sama lain. Jepang dan China memiliki konflik terkait sengketa pulau Senkaku/Diaoyu yang diduga memiliki potensi sumber daya alam, baik sumber daya alam maupun mineral dari wilayah laut sekitarnya.<sup>1</sup> Laut Cina Timur dianggap sebagai memiliki potensi besar atas eksploitasi minyak dan gas sehingga pulau ini menjadi rebutan kedua negara. Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan juga memiliki sejarah konflik dimana Jepang dulu pernah menjajah Korea sejak awal tahun 1905

---

<sup>1</sup> Professor Alfred Soons, Professor Nico Schrijver. *What does international law say about the China-Japan dispute over the diaoyu/senkaku islands?*. Briefing paper 3 December 2012.,hal 3

pada masa perang antara Rusia dan Jepang hingga tahun 1945 ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat.

Krisis Semenanjung Korea juga menjadi salah satu bagian dari kisah konflik kawasan Asia Timur. Kedua negara tersebut dahulunya merupakan satu wilayah Korea yang satu kini terbagi menjadi dua negara dengan ideologi yang berbeda pula. Korea Selatan dengan liberal demokratis sementara Korea Utara dengan ideologi sosialis yang diikuti paham *Juche* atau kepercayaan terhadap kemampuan nasionalnya sendiri. Terbaginya kedua negara ini sudah terjadi sejak tahun 1948 dimana telah ada dua Korea di Semenanjung Korea. Pembagian ini muncul sejak pasca Perang Dunia II dimana Jepang menyerah pada Amerika Serikat sehingga Korea memperoleh kebebasannya, namun kemudian wilayah ini diduduki oleh pasukan AS dan Uni Soviet yang masing masing menguasai bagian selatan dan utara. Kedua negara pemenang perang ini kemudian membangun bagian dari Korea yang didudukinya mengikuti karakteristik negara masing-masing. AS membantu membangun negara demokratis yang disebut Republik Korea (ROK) atau Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus 1948, sementara Soviet membantu membangun sebuah negara komunis yakni Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara pada 9 September 1948. Pasukan pendudukan meninggalkan

Semenanjung pada tahun 1949, membuat Korea independen tetapi dibagi menjadi dua sistem ideologi yang kontras.<sup>2</sup>

Krisis Semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara menjadi penting untuk menjadi perhatian karena hal ini terkait isu kepemilikan senjata pemusnah massal yakni nuklir oleh Korea Utara. Menjadi semakin mengkhawatirkan karena sejak 2006 Korea Utara sudah meluncurkan tujuh peluru kendali dan satu dari ketujuh peluru kendali tersebut diduga merupakan prototipe dari sistem peluncuran senjata nuklir yang diprediksi akan mampu mencapai wilayah Amerika Serikat di masa depan. Di tahun 2006 tersebut yakni pada tanggal 9 Oktober, Korea Utara melakukan tes pertama di Punggye-ri yang juga dikenal sebagai Punggye-yok, daerah terpencil di timur laut dekat kota Kilju. Dikatakan bahwa yang digunakan ialah plutonium dengan daya ledakan relatif kecil yakni kurang dari 1 kiloton. Sementara pada tahun 2009, tanggal 25 Mei, Korea Utara menyatakan telah meledakkan perangkat nuklir plutonium dengan daya ledak setara dengan bom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada tahun 1945. Tidak berhenti pada kedua percobaan nuklir tersebut, pada tanggal 12 Februari 2013 Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir dengan daya ledak 6 hingga 7 kiloton. Korea Utara menyatakan telah mengembangkan perangkat nuklir miniatur yang ringan untuk dapat diletakkan pada rudal jarak jauh yang bisa mencapai daratan

---

<sup>2</sup>Dr. Mark B. M. Suh. *A Tale of Two Koreas: Breaking the Vicious Circle*. October 14, 2013., hal 1.

Amerika Serikat.<sup>3</sup> Oleh karena itu krisis ini menjadi penting untuk diatasi terlebih karena Korea Utara sulit untuk diajak kembali dan berlaku kooperatif dalam segala perundingan terkait nuklirnya. Terlebih dengan adanya bantuan China terhadap Korea Utara baik moril maupun materiil.

China, negara yang merupakan sahabat baik dari Korea Utara kerap kali menjadi *back up state* bagi Korea Utara. Sebagai contoh pada peristiwa tenggelamnya kapal perang milik Korea Selatan di *Cheonan* yang setelah diselidiki dilakukan oleh pihak Korea Utara, China memilih sikap untuk menutup mata terhadap tindakan agresif dari Korea Utara dan mendesak untuk segera beralih dari isu tersebut tanpa menegur Pyongyang terlebih dahulu. Adapun tindakan RRC menyikapi uji coba nuklir Korea Utara di tahun 2006 dan 2009 yang meskipun sepakat dan berada pada pihak yang sama dengan resolusi PBB yang mengecam uji coba nuklir tersebut, persetujuan RRC tersebut didapat setelah dihapusnya persyaratan untuk sanksi ekonomi yang keras. China juga tidak menghentikan suplai energi atau makanan Korea Utara. Dalam hal ini China berupaya menahan negara-negara lainnya untuk bereaksi terlalu keras atas uji coba nuklir tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Soyeon Kim, Haesoo Yang. *Timeline of North Korea's Claimed Nuclear Tests*. <http://abcnews.go.com/International/timeline-north-koreas-nuclear-tests/story?id=36112252>. Diakses pada 8 Januari 2016.

<sup>4</sup> Jooyoung Song. Understanding China's Response to North Korea's Provocations. *Asian Survey*, Vol. 51, No. 6 (November/December 2011), pp. 1134-1155. University of California Press.

Namun, ada hal yang berbeda terjadi pasca uji coba nuklir ketiga Korea Utara tersebut. Nyatanya peluncuran perangkat nuklir Korea Utara yang diikuti dengan peningkatan ancaman terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat saat itu justru memicu sikap retorik Presiden Republik Rakyat China (RRC), Xi Jinping yang mengecam program nuklir Korea Utara. Secara mengejutkan RRC yang selama ini menjadi negara yang selalu menjadi pelindung Korea Utara dari segala sanksi yang diberikan PBB justru tampaknya jauh lebih tegas untuk menghukum Korea Utara atas uji coba nuklir ketiga. Seperti yang telah diketahui bahwa RRC dengan ideologi yang sama dengan Korea Utara selalu menjadi mitra pendukung segala kebijakan yang dilakukan Korea Utara baik secara moral maupun materiil. RRC telah menjadi penyokong bantuan dana pinjaman pada periode awal pembangunan Korea Utara. RRC pun dapat menjadi ancaman karena penggunaan vetonya di PBB pada setiap upaya pemberian sanksi atas uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara. Sudah menjadi fakta umum bahwa Beijing memiliki nilai strategis atas isu keamanan kawasan, serta bahwa Beijing dan Pyongyang telah lama berkonsolidasi baik di bidang politik, ekonomi, diplomatik, dan budaya.

Dalam kasus uji coba nuklir tahun 2013, Korea Utara dalam hal ini melanggar Resolusi PBB 2087 yang diberlakukan untuk mengecam Korea Utara atas pengujian rudalnya. Atas kasus ini RRC kemudian mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam tindakan tersebut dan mengancam akan menjauhkan diri dari Korea Utara dengan menyatakan,

*“Tidak ada yang diperbolehkan untuk menjatuhkan kawasan dan bahkan dunia dalam kekacauan hanya untuk keuntungan sepihak”.*

Sikap ini berubah dibandingkan keputusannya untuk tetap merangkul dan mempertahankan Korea Utara sebagai aset strategis ketika dihadapkan pada isu uji coba nuklir kedua Korea Utara pada tahun 2009.<sup>5</sup> RRC, di bawah pemimpin baru Xi Jinping, berusaha untuk menegaskan kepada Pyongyang bahwa RRC tidak menginginkan uji coba tersebut. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat kemudian mengadopsi resolusi baru guna mengutuk uji coba nuklir dengan sanksi meng-ilegal-kan aktivitas personil diplomatik dan aktivitas bank Korea Utara, termasuk apabila terdapat transaksi yang patut dipertanyakan.<sup>6</sup> RRC mendukung resolusi ini melalui statemen publik Duta Besar RRC yang menyatakan bahwa RRC secara resmi berkomitmen untuk menjaga aman perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.<sup>7</sup> Reaksi resmi Beijing ini tegas dan cepat dibuktikan dengan segera dilakukannya pemanggilan Duta Besar Korea Utara oleh Menteri Luar Negeri China untuk mengajukan protes dan ketidaksukaan atas uji coba tersebut. Ada banyak indikasi bahwa

---

<sup>5</sup>Synder, S. A. (2013, June 30). *China and the Denuclearization of the Korean Peninsula*. The Diplomat: <http://thediplomat.com/2013/06/china-and-the-denuclearization-of-the-korean-peninsula/>

<sup>6</sup>Rodong Shinmoon, April 2, 2013; New YorkTimes, March 31, 2013.

<sup>7</sup>Hong Yung Lee. *North Korea in 2013: Economy, Executions, and Nuclear Brinkmanship*. Source: Asian Survey, Vol. 54, No. 1, A Survey of Asia in 2013 (January/February 2014), pp.89-100

China sebenarnya telah memberikan peringatan kartu kuning atas perilaku Korea Utara tersebut.<sup>8</sup>

Perubahan sikap RRC tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Park Geun Hye yang baru saja dilantik menjadi Presiden Korea Selatan untuk merangkul RRC yang juga berada pada kepemimpinan baru XI Jinping untuk menghadapi Korea Utara dan perangkat nuklirnya. Dengan berjalannya waktu, kerjasama yang telah berjalan selama dua dasawarsa terakhir telah meningkatkan hubungan baik kedua negara. Dibawah kepemimpinan baru kedua negara, ada perubahan positif politik luar negeri Korea Selatan dan China dalam menyikapi upaya stabilisasi kawasan Semenanjung Korea. Korea Selatan ditangan Park Geun Hye menjalankan politik luar negeri “Trustpolitik” dengan menekankan kepercayaan pada pembuatan kebijakan dan implementasinya yang dalam hal ini dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Yun Byung-se terkait pada hubungan antara kedua Korea. Menurut aspek politik luar negeri ini, kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara tidak lagi berjalan secara keras ataupun koersif satu sama lain, tetapi beralih kepada kebijakan yang pilihan kebijakan yang efektif dan seimbang seperti hubungan antara kedua Korea dan hubungan luar negerinya dengan instrumen-instrumen dialog dan kerjasama. Sementara itu, kepemimpinan China yang baru dibawah Xi Jinping menunjukkan arah kebijakan yang berbeda pula dari sebelumnya. Gaya Xi Jinping yang berbeda dari para pendahulunya nyatanya telah

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan otoritas pribadi daripada pemimpin China sejak Mao Zedong. Ia telah melawan prediksi dengan mendirikan kembali keunggulan partai atas negara dan mengembalikan kepemimpinan pribadi sebagai pengganti "Kepemimpinan kolektif" yang dianggap di masa lalu dekade menjadi norma baru di China. Ketika kebijakan luar negeri pada masa Deng Xiaoping bagi Cina adalah untuk "menyembunyikan kekuatan dan mengulur waktu" (*taoguang yanghui*), pada Januari 2014 Sekretaris Jenderal Partai Komunis China Xi Jinping mengumumkan bahwa China harus "proaktif" (*fenfa you wei*). Terkait denuklirisasi Korea Utara, China telah meningkatkan upayanya melalui pembicaraan dengan mengirim utusannya ke Pyongyang pada awal September tahun 2013 dan mengusulkan segera setelah itu untuk mengadakan pertemuan informal antara peserta Six Party Talk.<sup>9</sup>

Peningkatan hubungan bilateral Korea Selatan dan China terkait denuklirisasi Korea Utara salah satunya dimanfaatkan oleh Korea Selatan dengan kunjungan Park Geun Hye ke Beijing pada Juni 2013 silam yang bertujuan untuk mempererat hubungan kedua negara serta membicarakan masalah nuklir Korea Utara yakni kerjasama kedua negara untuk dapat bersama sama mendorong Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan dalam *six party talks*. Seperti yang dikutip dalam Yonhap News Korea Selatan, Park Geun Hye meminta Xi Jinping untuk membantu

---

<sup>9</sup>Bajoria, J., & Xu, B. *The Six Party Talks on North Korea's Nuclear Program*. Retrieved June 18, 2014, from Council on Foreign Relations: <http://www.cfr.org/proliferation/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program/p13593>.

mencegah uji coba nuklir Korea Utara. Menurut Yonhap News, Presiden Park mengatakan bahwa uji coba nuklir lain dari Korea Utara akan memberikan efek "domino nuklir" yang akan memicu perlombaan senjata di kawasan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibentuknya rezim keamanan guna mencegah hal tersebut. Untuk itu dalam kasus ini Presiden Park Geun-hye meminta RRC melalui Presiden Xi Jinping untuk membantuannya membujuk Pyongyang untuk tidak melakukan uji coba nuklir lain dan kembali pada perundingan.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Mengapa Korea Selatan menjadikan RRC sebagai mitra dalam upaya mengembalikan Korea Utara dalam membentuk rezim keamanan?

## **C. Kerangka Teoritik**

Menjadikan RRC sebagai mitra dalam upaya menciptakan rezim keamanan kawasan Semenanjung Korea, terkhusus guna mengembalikan Korea Utara dalam six party talk merupakan cara Korea Selatan pada masa pemerintahan Park Geun Hye memperbaiki hubungan luar negerinya dengan negara-negara tetangga dan meningkatkan stabilitas kawasan. Hal ini menjadi salah satu tujuan politik luar negeri yang diterapkan Presiden Park Geun Hye di masa pemerintahannya. Dalam menjalankan politik

---

<sup>10</sup>Tiezzi, S. *Park Geun-hye Asks China to Prevent North Korean Nuclear Test*. Retrieved April 25, 2014, from The Diplomat: <http://thediplomat.com/2014/04/park-geun-hye-asks-china-to-prevent-north-korean-nuclear-test/>

Luar Negeri ini tentunya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Maka, untuk menganalisa rumusan masalah, penulis menggunakan Konsep Rezim Keamanan dan Kepentingan Nasional yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

1) Konsep Rezim Keamanan

Seorang tokoh pemikir Neo-Realis, Robert Jervis memperkenalkan Konsep Rezim Keamanan pada tahun 1982. Rezim didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik secara implisit ataupun eksplisit yang berdasarkan ekspektasi bersama aktor-aktor terkait isu tertentu dalam hubungan internasional. Prinsip didefinisikan sebagai keyakinan atas fakta, sebab, dan kebenaran. Sementara norma merupakan standar perilaku yang ditetapkan dalam hal hak dan kewajiban. Kemudian, aturan dapat diartikan syarat ataupun pantangan atas suatu tindakan tertentu. Sementara prosedur pengambilan keputusan ialah praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan kebijakan kolektif. Dijelaskan pula dalam teori ini bahwa sebuah rezim keamanan tidak berarti bahwa hubungan antara para anggotanya yang harmonis dan tanpa konflik di dalamnya. Sebaliknya, konflik akan tetap terjadi tetapi aktor telah saling bersepakat untuk bekerja sama dalam menangani konflik tersebut.

*"...those principles, rules and norms that permit nations to be restrained in their behavior in the belief that others will reciprocate. This concept implies not only norms and expectations that facilitate cooperation, but a form of cooperation that is more than the following of short-run selfinterest." (Jervis 1982: 357)*

Jervis dalam hal ini menitikberatkan pada kooperasi dan perilaku timbal balik yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rezim sehingga dapat membatasi perilaku negara berdasarkan atas prinsip, aturan, dan norma yang telah disepakati bersama. Konsep ini menggambarkan suatu bentuk kerjasama yang lebih dari pemenuhan kepentingan pribadi jangka pendek. Sebagai contoh ialah apabila kita mengikuti permintaan perampok yang meminta kita menyerahkan uang bukanlah jalan untuk menciptakan sebuah rezim meskipun jika interaksi terjadi berulang kali dan para aktor melakukannya secara sukarela. Demikian pula, kondisi bahwa negara adidaya tidak menyerang negara-negara lain yang lebih lemah dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama, namun bukanlah sebuah rezim. Untuk itu Jervis telah mengidentifikasi empat kondisi untuk terciptanya sebuah rezim keamanan:

1. Para aktor besar harus memiliki keinginan untuk menciptakan rezim keamanan;
2. Aktor-aktor yang terlibat harus percaya bahwa mereka bertanggungjawab untuk bekerjasama mewujudkan nilai-nilai keamanan bersama;

3. Rezim keamanan tidak dapat terbentuk ketika satu atau lebih aktor percaya bahwa keamanan diciptakan dengan jalan ekspansi; dan
4. perang dan perilaku individualistis harus dilihat sebagai tindakan dengan pengorbanan yang akan berbiaya mahal.<sup>11</sup>

*Concert of Europe* yang berlaku sejak tahun 1815 hingga 1823 menjadi contoh yang baik atas praktik teori ini. Aktor-aktor yang terlibat tidak berupaya memaksimalkan pencapaian kekuasaan individu, ataupun berupaya mengambil keuntungan atas kelemahan aktor lain melainkan lebih mengedepankan konsesi dibandingkan penggunaan ancaman terlebih lagi tindakan perang.<sup>12</sup> Maka, dalam kasus ini Korea Selatan dengan kepemimpinan baru Park geun Hye yang mengedepankan dialog dan kerjasama dalam politik luar negerinya berupaya mengembalikan Korea Utara dalam Six Party Talk, untuk itu Korea Selatan menggandeng RRC melalui dialog dan kunjungannya ke Beijing dan menyatakan keinginannya untuk meminta RRC membantu upayanya tersebut. Sebagai aktor kuat di kawasan yang tengah menunjukkan perubahan sikap terkait uji coba nuklir Korea Utara tersebut, RRC strategis untuk ikut mendukung kembalinya Korea Utara dalam

---

<sup>11</sup> Mikael Weissmann. *Understanding the East Asian Peace : Informal and formal conflict prevention and peacebuilding in the Taiwan Strait, the Korean Peninsula, and the South China Sea 1990-2008*. 2009. Göteborg: University of Gothenburg., hal 41.

<sup>12</sup>Robert Jervis. *Security Regimes*. International Organization, Vol. 36, No. 2, International Regimes (Spring, 1982), pp. 357-378. MIT Press., hal 362.

berundingan agar terciptanya keamanan kawasan tanpa ada suatu bangsa berupaya memuaskan kepentingannya sendiri. Terutama dengan adanya kedekatan RRC dan Korea Utara baik moril maupun materiil, RRC dapat menggunakan kedudukannya sebagai sumber perdagangan dan bantuan asing terbesar Korea Utara dalam untuk mempengaruhi keputusan Pyongyang.<sup>13</sup>

## 2) Konsep Kepentingan Nasional

Setiap tindakan politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain tentunya telah melalui proses pembuatan keputusan oleh para pembuat kebijakan negara tersebut. Namun ada pertimbangan pertimbangan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan yakni kepentingan nasional. Dalam buku *Politic Among Nation*, kepentingan merupakan bagian dari enam prinsip realisme politik. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan adalah standar dimana tindakan politik harus dinilai dan diarahkan karena tujuan dari kebijakan luar negeri harus didefinisikan dalam hal kepentingan nasional.<sup>14</sup>

Sementara konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton yakni sebagai berikut:

“Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan (*Decision Making*) dalam

---

<sup>13</sup>Tiezzi, S. Op.cit.

<sup>14</sup>Hans J. Morgenthau. (1985). *Politics Among Nations*.

merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi Negara untuk mencakup mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan dan kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi”.<sup>15</sup>

Batasan atas konsepsi mengenai kepentingan nasional yang dikemukakan Jack C. Plano dan Roy Olton ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa dari kepentingan nasional yakni sebagai berikut:

- (1) Kelangsungan hidup negara yakni negara harus melindungi dan mempertahankan diri dari segala potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas bahkan mengancam keberlangsungan hidup negara baik dari luar negara maupun dari dalam internal negara;
- (2) Kemerdekaan dan kedaulatan, yakni bahwa suatu negara harus merdeka, bebas dan tidak seharusnya dijajah serta tidak tunduk dan patuh kepada negara lain, negara harus berdaulat dan tidak berada dalam pengaruh negara lain. Maka kemerdekaan dan kedaulatan ini perlu dicapai dan dipertahankan;

---

<sup>15</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *International Relations Dictionary* (USA: Rinehart and Wingston, Inc., 1969), hal 128.

- (3) Keutuhan wilayah, yakni kebutuhan setiap negara menjaga keutuhan wilayahnya baik dari ancaman separatisme, iredentisme, ataupun ancaman keutuhan wilayah karena pihak luar;
- (4) Keamanan militer, yakni bahwa negara memiliki kepentingan untuk menjaga negaranya dari gangguan ataupun ancaman militer dari negara lain; dan
- (5) Kesejahteraan ekonomi, negara harus dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, untuk itu negara harus dapat menjaga kestabilan kondisi ekonomi domestik.

Terpilihnya Park Geun Hye sebagai presiden baru Korea Selatan dalam pemilu Korea Selatan tahun 2012 tentunya menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya yakni dibawah kepemimpinan Presiden Lee Myung Bak. Problematika dan tantangan baik domestik maupun internasional tersebut diantaranya yakni kondisi perokonomian yang stagnan dan masalah lapangan kerja, serta bagaimana menggeser kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Selatan di masa Lee Myung Bak yang cenderung keras. Memang kedua poin tersebut yakni ekonomi dan hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara dengan *Trustpolitik*-nya merupakan visi misi yang disampaikan presiden Park semasa kampanye. Selain itu pemerintahan baru Presiden Park menghadapi

tantangan untuk dapat memperbaiki ketegangan serta meningkatkan hubungan diplomatik baik dengan Republik Rakyat China (RRC) dan Jepang sementara tetap menjaga aliansinya dengan Amerika Serikat.<sup>16</sup> Terdapat dua poin dalam politik luar negeri terkait kasus ini yakni perbaikan hubungan dengan RRC dan kebijakan terhadap Korea Utara. Oleh karena itu, upaya Korea Selatan menjadikan RRC sebagai mitra guna menekan Korea Utara untuk mengakhiri propaganda nuklirnya serta mengembalikan Korea Utara kedalam perundingan enam negara melalui kunjungan dan dialognya dengan RRC dapat dilihat sebagai upaya peningkatan hubungan dengan RRC berdasarkan kepentingan nasionalnya atas keamanan militer yakni guna mengamankan Korea Selatan dari ancaman nuklir Korea Utara. Sebagaimana diketahui bahwa meskipun kedua Korea bersaudara satu sama lain, kepemilikan nuklir Korea Utara mengancam keamanan Korea Selatan terutama pasca uji coba nuklir ketiganya diawal tahun 2013 silam.

---

<sup>16</sup> Yul Sohn and Won-Taek Kang. *South Korea in 2013: Meeting New Challenges with the Old Guard*. Asian Survey, Vol. 54, No. 1, A Survey of Asia in 2013 (January/February 2014), pp.138-144. University of California Press., hal 138.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan teori yang telah digunakan, dapat diambil dugaan bahwa Korea Selatan menjadikan RRC sebagai mitra dalam upaya pembentukan rezim keamanan kawasan Semenanjung Korea karena:

1. RRC yang merupakan aliansi lama dari Korea Utara telah menunjukkan keinginan pencapaian stabilitas keamanan semenanjung.
2. Korea Selatan ingin menjaga keamanan nasionalnya atas propaganda dan ancaman perangkat nuklir yang dimiliki Korea Utara.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memaparkan alasan-alasan RRC dijadikan mitra bagi Korea Selatan dalam upaya pembentukan rezim keamanan kawasan di masa pemerintahan Park Geun Hye.
2. Untuk memberikan informasi peningkatan intensitas hubungan Korea Selatan dan RRC di masa pemerintahan Park Geun Hye.
3. Untuk mengetahui dan memberikan informasi tindakan-tindakan yang dilakukan Korea Selatan terhadap RRC dalam upaya peningkatan stabilitas kawasan.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk menciptakan pembahasan yang jelas dan terperinci, penulis membatasi pembahasan mengenai faktor-faktor ataupun alasan yang

membuat RRC patut dijadikan mitra oleh Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park geun Hye (2013-2015). Namun tidak menutup kemungkinan disinggung pula pembahasan atas tidakan pemerintah Korea Selatan terhadap RRC di pemerintahan sebelumnya guna menggambarkan secara jelas peningkatan yang terjadi.

### **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan, penulis menggunakan metode kualitatif, yang Secara umum terdiri dari investigasi yang mencari jawaban untuk pertanyaan, menggunakan satu set standar prosedur untuk menjawab pertanyaan, mengumpulkan bukti guna menghasilkan temuan yang tidak dapat ditentukan di muka.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif ditandai dengan tujuannya yang berhubungan dengan memahami beberapa aspek dalam kehidupan sosial, metode penelitian kualitatif pada umumnya menghasilkan kata-kata sebagai data untuk analisis. Metode kualitatif umumnya bertujuan untuk memahami pengalaman dan sikap objek. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 'apa', 'bagaimana' atau 'mengapa' dari fenomena yang diangkat.<sup>18</sup> Penulis mengumpulkan bukti melalui studi kepustakaan dengan menggali literatur dari berbagai sumber baik melalui buku, jurnal, surat kabar, artikel, dokumen pemerintah, ataupun berbagai

---

<sup>17</sup> Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide.

<sup>18</sup>Michael Quinn Patton and Michael Cochran. *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*. 2002.

sumber online termasuk *official website*. Untuk menganalisa kasus, penulis menggunakan konsep rezim keamanan dan konsep kepentingan nasional.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **Bab. I Pendahuluan**

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Politik Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Krisis Semenanjung**

Bab ini membahas politik luar negeri Korea Selatan pada pemerintahan sebelum hingga pada masa pemerintahan Park Geun Hye. Akan dijelaskan pula apa itu krisis Semenanjung Korea dan bagaimana dinamika krisis yang terjadi hingga masa pemerintahan Park Geun Hye.

### **Bab III Dinamika Hubungan Korea Selatan dan RRC**

Bab ini membahas subjek penelitian yakni Korea selatan dan bagaimana dinamika hubungan Korea Selatan dan RRC sebelum hingga masa pemerintahan Park Geun Hye.

### **Bab IV Hubungan Korea Selatan dan RRC Pada Masa Pemerintahan Park geun Hye**

Bab ini berisi analisis faktor-faktor ataupun alasan Korea Selatan menjadikan RRC sebagai mitra dalam upaya stabilisasi kawasan di masa Park Geun Hye berikut dengan bukti bukti kerjasama dan

hubungan luar negeri kedua negara. Pada bab ini dijelaskan bagaimana kerangka teoritik yang digunakan dapat menjadi dasar pemilihan RRC sebagai mitra Korea Selatan demi mencapai kepentingan nasionalnya.

#### Bab V. Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan.